

EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM MENGATASI ABRASI DI KAWASAN SUNGAI ROKAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN RIMBA MELINTANG)

Oleh

Hermawan dan Moris Adidi Yogia

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

Abrasion is one of the problems that threaten coastal conditions that can also threaten the river line so that backward causing the land eroded and the river increasingly widespread, of course this is very dangerous for people, especially for those who live on the riverbank because the consequences of this abrasi make the loss of land agricultural, community gardens, community houses and public roads if this continues to happen, this should be the government's concern. the purpose of this study is to know and explain how the Performance of Public Works and Spatial Planning of Rokan Hilir in Overcoming Abrasion in the Rokan River Area (Case Study in Kelurahan Rimba Melintang), as well as to know and explain the obstacles that experienced by the of Public Works and Spatial Planning of Rokan Hilir in Overcoming Abrasion In the Rokan River Area (Case Study in Kelurahan Rimba Melintang). To know the Performance of Public Works and Spatial Planning of Rokan Hilir in Overcoming Abrasion in the Rokan River Area (Case Study in Kelurahan Rimba Melintang), the researcher took the population and the sampel amounted to 43 people, namely 3 employees of public works and spatial planning agency and 40 people which affected by the Abrasion in Kelurahan Rimba Melintang, while the key informant in this research is the Head of Public Works and Spatial Planning. The sampling technique for public Service Officer and Urban Spatial Planning of Rimba Melintang Urban Village is Incidental sampling. While the theory of evaluation that researchers use is William N.Dunn theorist where the criteria of evaluation criteria is Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness and Accuracy. After all data is analyzed by qualitative and quantitative method hence the Performance of Public Works and Spatial Planning of Rokan Hilir in Overcoming Abrasion in the Rokan River Area (Case Study in Kelurahan Rimba Melintang), is "Less Good" therefore for the future to overcome the abrasion of the rokan river area needs to be improved again.

Keywords ; Evaluation ; Performment

ABSTRAK

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir yang dapat juga mengancam garis sungai sehingga mundur kebelakang yang mengakibatkan daratan makin terkikis dan sungai makin meluas, tentu hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya bagi yang tinggal ditepi sungai karena akibat dari abrasi ini membuat hilangnya lahan pertanian, kebun-kebun masyarakat, rumah masyarakat dan juga jalan umum jika hal ini terus terjadi, hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang), serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dialami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang). Untuk mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) maka peneliti mengambil populasi dan sampel berjumlah 43 orang yakni 3 orang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 40 orang Masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang, adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun teknik penarikan sampel untuk Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah *Sensus Sampling* dan untuk Masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang adalah *Incidental Sampling*. Sementara itu teori evaluasi yang peneliti pakai adalah teori William N.Dunn dimana kriteria-kriteria evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Setelah semua data dianalisa dengan metode kualitatif dan kuantitatif maka diperoleh hasil Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) adalah "Kurang Baik". Oleh karena itu untuk masa yang akan datang dalam mengatasi abrasi dikawasan sungai rokan perlu ditingkatkan lagi

Kata Kunci ; Evaluasi ; Kinerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, bencana abrasi yang terjadi dikawasan Sungai Rokan di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sudah semakin parah. Ratusan rumah penduduk, lahan kebun, termasuk rumah ibadah, tempat pemakaman umum dan jalan setempat dikikis abrasi. Abrasi didaerah ini terjadi mulai pada tahun 1992 sampai dengan sekarang dan hanya dibangun turap 1 (satu) kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan

Hilir yakni pada tahun 2007. Turap yang dibangun pada tahun 2007 tersebut hanya bertahan selama 4 tahun, pada tahun 2011 abrasi kembali terjadi hingga sampai saat ini. Melihat kondisi yang terjadi demikian, maka pemerintah harus melakukan upaya rehabilitas kawasan mangrove dan pembangunan infrastruktur bangunan penahan gelombang. Selain melakukan penanaman hutan mangrove, usaha yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan membangun turap atau bangunan penahan gelombang lainnya. Namun kenyataan yang terlihat bahwa semenjak tahun 2007, belum pernah ada program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pembangunan turap ataupun bangunan penahan gelombang lainnya di kelurahan rimba melintang. Sementara abrasi semakin parah dengan runtuhnya ratusan rumah penduduk, lahan kebun, termasuk rumah ibadah, tempat pemakaman umum dan jalan. Bencana abrasi didaerah itu hingga kini sudah menggerus bibir sungai sepanjang 250 meter dengan panjang \pm 1500 meter. Pemerintah setempat harus mengatasi masalah abrasi ini agar tidak meluas, karena masyarakat yang tinggal disekitar sungai ini sudah tidak seperti biasanya yang dahulunya ramai, namun kini mereka sudah meninggalkan wilayah itu.

Tabel 1 Kelurahan Dan Desa yang terkena abrasi di Kecamatan Rimba Melintang

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Panjang abrasi
Rimba Melintang	Rimba melintang	1. Mukti Jaya 2. Teluk Pulau Hilir 3. Pematang Sikek 4. Teluk Pulau Hulu 5. Jumrah 6. Seremban Jaya	250 M dengan panjang 1,5 Km 1,5 Km dengan panjang 5 Km 200 M dengan panjang 3 Km 200 M dengan panjang 2 Km 200 M dengan panjang 3 Km 100 M dengan panjang 1 Km 200 M dengan panjang 1 Km

Sumber : Kecamatan Rimba Melintang 2018

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa ada 5 desa dan 1 kelurahan yang terkena abrasi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan panjang kawasan abrasi :

1. Kelurahan Rimba Melintang sepanjang 250 M dengan panjang dari hilir ke hulu 1,5 Km, Abrasi didaerah ini terjadi mulai pada tahun 1992 sampai dengan sekarang dan hanya dibangun turap satu kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yakni pada tahun 2007 dan dibangun bronjong satu kali oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016. Turap yang dibangun pada tahun 2007 tersebut hanya sepanjang 273 meter dengan dana sebesar Rp. 1,5 miliar dan hanya bertahan selama 4 tahun, pada tahun 2011 abrasi kembali terjadi hingga sampai saat ini. Sedangkan pembangunan bronjong pada tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Riau hanya sepanjang 130 meter dengan dana sebesar 1,5 miliar. Yang terkena abrasi ada 4 (empat) RT yakni RT 001, RT 004, RT 005 dan RT 030. RT 001 sebanyak 26 rumah, 1 mushola, 1 MDA dan 2 hektar lahan kebun, RT 004 sebanyak 49 rumah, 1 masjid dan pemakaman dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar, RT 005 sebanyak 38 rumah, SD swasta dan los pasar pekan rabu, RT 030 sebanyak 35 rumah dan 1 kantor babinsa.
2. Kepenghuluan Mukti Jaya sepanjang 1,5 Km dengan panjang dari hilir ke hulu 5 Km. Abrasi didaerah ini merupakan abrasi terparah namun sekarang sudah tidak abrasi lagi dikarenakan timbulnya beting/tanah timbul. Abrasi terjadi sejak tahun 2000-2011 dan yang terkena abrasi adalah area persawahan.
3. Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir sepanjang dengan panjang dari hilir ke hulu 3 Km. Yang terkena abrasi lahan kebun.
4. Kepenghuluan Pematang Sikek sepanjang 200 M dengan panjang dari hilir ke hulu 2 Km. Yang terkena abrasi pemukiman penduduk dan 1 rumah suluk.
5. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu sepanjang 200 M dengan panjang dari hilir ke hulu 3 Km.. Yang terkena abrasi pemukiman penduduk dan pasar.
6. Kepenghuluan Jumrah sepanjang 100 M dengan panjang dari hilir ke hulu 1 Km. Pada tahun 2016 sudah dibangun bronjong namun hanya didekat jembatan jumrah saja. Proyek tersebut dibangun oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Bidang Pengairan Provinsi Riau dengan dana sebesar Rp. 1.561.002.000.
7. Kepenghuluan Seremban Jaya sepanjang 200 M dengan panjang dari hilir ke hulu 1 Km. Pada tahun 2014 sudah dibangun turap namun

hanya didekat jembatan jumrah saja dengan memakan dana sebesar Rp. 1,3 Miliar melalui APBD Provinsi Riau. Namun baru satu bulan dibangun kondisi turap sudah banyak mengalami keretakan.

Berdasarkan keterangan diatas, hanya sedikit yang terealisasikan pembangunan turap atau bangunan penahan gelombang lainnya dari ketujuh desa/kelurahan diatas hanya kelurahan rimba melintang, kepenghuluan seremban jaya dan kepenghuluan jumrah saja yang pernah dibangun turap. Dan pembangunan turap di kepenghuluan seremban jaya dan kepenghuluan jumrah itu pun melalui APBD Provinsi Riau bukan APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Maka tugas ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saja tetapi juga kerjasama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta peran dinas bersangkutan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Maka Fenomena yang dapat dilihat dari keterangan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Abrasi didaerah ini terjadi mulai pada tahun 1992 sampai dengan sekarang dan hanya dibangun turap satu kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yakni pada tahun 2007 dan dibangun bronjong satu kali oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016. Turap yang dibangun pada tahun 2007 tersebut hanya bertahan selama 4 tahun, pada tahun 2011 abrasi kembali terjadi hingga sampai saat ini. Sedangkan bronjong yang dibangun pada tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Riau hanya sepanjang 130 meter.
2. Semenjak tahun 2007, belum pernah ada program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pembangunan turap ataupun bangunan penahan gelombang lainnya di kelurahan rimba melintang. Sementara abrasi semakin parah dengan runtuhnya ratusan rumah warga, lahan kebun, termasuk rumah ibadah, tempat pemakaman umum dan jalan.
3. Pengelolaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mengatasi abrasi tidak hanya membangun turap atau bangunan penahan gelombang lainnya sebagai pemecah gelombang saja tetapi juga perlu kerjasama dengan dinas kehutanan dengan menanam pohon bakau. Namun kenyataannya sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) dan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).
2. Apa Hambatan-Hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).
- b. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan yang terjadi Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan di Kelurahan Rimba Melintang.

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan akademis
Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi publik, khususnya yang membahas persoalan yang berkaitan dengan bidang evaluasi kinerja dinas.
- b. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi/masukan atau informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Kelurahan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, dan di Kabupaten Rokan Hilir secara luas.
- c. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) adalah suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafie, 2006;13) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Konsep Organisasi

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafie, 2006;52) Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu system administrasi.

Menurut John D. Millet (dalam Siagian, 2006;51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Konsep Manajemen

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;19) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2014;17) Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara (2011;2) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan juga sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Konsep Kinerja

Menurut Moh. Pabundu Tika (2005;121) Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011;67) Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011;67) istilah kinerja berasal dari kata *job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Konsep Evaluasi

William N.Dunn (2003;608-611), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*),

pemberian angka (rating), dan penilaian (*assesment*), Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses: perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Pembangunan

Menurut Taliziduhu Ndraha (2001;134) Pembangunan pemerintah adalah pembangunan kemampuan pemerintah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik layanan civil.

Menurut Coralie Bryant dan Louise White (dalam Taliziduhu Ndraha, 1990;15-16) pembangunan adalah upaya yang meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tubuhnya bersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equality*).

3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan bersama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).

Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Stoner (dalam Zulkifli, 2014;17).

Menurut Robert J. Kodotie (2010;61) pengelolaan didefinisikan sebagai suatu aktivitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dalam mengendalikan atau mengelola kegiatan.

Tahap pengelolaan dimulai dari :

1. Pengorganisasian
2. Operasi

3. Pemeliharaan
4. Organisasi
5. Kepemimpinan
6. Pengendalian sampai pada evaluasi dan monitoring

Pengendalian

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011;199) Pengendalian adalah setiap keputusan yang dibuat berisi kendali sebagai alat untuk mengarahkan organisasi pada tujuan, dalam kecepatan tertentu.

Menurut Robert J. Kodotie (2010;64) Pengendalian merupakan upaya kontrol pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap sumber daya manusia organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan eksistensi dan efektivitas dari sisi-sisi waktu (time), ruang (space), biaya (cost) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan, penganggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu pembangunan baik dalam situasi normal maupun darurat. Kodotie (2010;64-65).

Pemeliharaan prasarana sumber daya air terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. Kodotie (2010;379).

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Penilaian
istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>), dan penilaian (<i>assesment</i>), Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. William N.Dunn (2003;608).	Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)	1. Efektivitas	1. Pelaksanaan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku 2. Keterlibatan dinas dalam mengatasi abrasi	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	1. Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas 2. Upaya dinas dalam mengatasi abrasi	
		3. Kecukupan	1. Pembangunan turap dikawasan yang terkena abrasi 2. Kepedulian masyarakat memelihara kawasan sungai	
		4. Perataan	1. Keadilan dalam mendapatkan pembangunan 2. Keadilan dalam menetapkan kebijakan	
		5. Responsivitas	1. Hasil kinerja dinas 2. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja dinas	
		6. Ketepatan	1. Memberikan kepuasan terhadap kinerja dinas 2. Ketertiban dan keteraturan pembangunan	

Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik. Adapun teknik yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Baik : Jika rata-rata presentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori ukuran $\geq 67\%$ dari jawaban responden.

Cukup Baik : Jika rata-rata presentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Jika rata-rata presentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$ dari jawaban responden.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Pemilihan dinas tersebut karena

merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan pembangunan turap ataupun bangunan penahan gelombang lainnya dalam mengatasi abrasi di kawasan sungai Rokan Kelurahan Rimba Melintang. Dimana melihat kondisi alam yang terjadi, abrasi merupakan ancaman besar bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sungai Rokan Kelurahan Rimba Melintang, yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Populasi dan Sampel

Tabel 3 : Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Presentase
1	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	100%
2	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1	1	100%
3	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA	1	1	100%
4	Masyarakat Yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang	148	40	27%
Jumlah		151	43	28,47%

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang penulis lakukan terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).
2. Wawancara, yaitu melakukan dialog (Tanya jawab) untuk

memperoleh data secara langsung dari responden.

3. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membuat suatu pertanyaan kepada responden mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Evaluasi Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi Di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus Di Kelurahan Rimba Melintang

1. Efektivitas

Tabel 4 : Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air dilihat dari Indikator Efektivitas

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku	3	-	-	3
2	Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi dikawasan sungai rokan Kelurahan Rimba Melintang	3	-	-	3
3	Program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi abrasi	3	-	-	3
4	Program dari dinas berjalan dengan baik dan apa saja hambatan didalam melaksanakan pembangunan	3	-	-	3
Jumlah		12	-	-	12
Persentase		100%	-	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator efektivitas. Pada pertanyaan Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanyaan Bagaimana keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi dikawasan sungai rokan Kelurahan Rimba Melintang, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3

orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Selama ini keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi berupa pembangunan turap pada tahun 2007 sepanjang 273 meter dan telah menyampaikan kondisi abrasi ke pihak provinsi untuk dilakukan perbaikan.

Pertanyaan Apakah program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi abrasi tersebut terlaksana, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi abrasi berupa turap, bronjong, talud, akan tetapi tidak semua program tersebut terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran dan dikarenakan sekarang program tersebut telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015 tentang Wilayah Sungai Rokan.

Pertanyaan Apakah semua program dari dinas berjalan dengan baik dan apa saja hambatan didalam melaksanakan pembangunan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0. Tidak semua program dari dinas tersebut berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan seperti permasalahan sosial masyarakat, keterbatasan anggaran sehingga pembangunan yang dilakukan hanya secara prioritas saja.

Tabel 5 : Tanggapan Responden masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang dilihat dari Indikator Efektivitas

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku	15	14	11	40
2	Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi dikawasan sungai rokan Kelurahan Rimba Melintang	5	17	18	40
3	Program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi abrasi	4	20	16	40
4	Program dari dinas berjalan dengan baik dan apa saja hambatan didalam melaksanakan pembangunan	3	15	22	40
Jumlah		27	66	67	160
Persentase		16,87%	41,25%	41,87%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator efektivitas. Pada pertanyaan Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 15 orang, tanggapan cukup baik sebanyak 14 orang, dan 11 orang memberikan tanggapan kurang baik. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanyaan Bagaimana keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi dikawasan sungai rokan Kelurahan Rimba Melintang, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, tanggapan cukup baik 17 orang, dan 18

orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

Selama ini keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi dikawasan sungai rokan Kelurahan Rimba Melintang hanya sekali saja melakukan pembangunan turap yakni pada tahun 2007, turap tersebut pun setelah dibangun dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemeliharaan atau pengelolaan lebih lanjut.

Pertanyaan Apakah program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi abrasi tersebut terlaksana, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, tanggapan cukup baik 20 orang, dan 16 orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

Pertanyaan Apakah semua program dari dinas berjalan dengan baik

dan apa saja hambatan didalam melaksanakan pembangunan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 15, dan 22 orang responden memberikan tanggapan kurang baik. Tidak semua program dari dinas tersebut berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan seperti permasalahan sosial masyarakat, serta keterbatasan anggaran.

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada indikator efektivitas. Tanggapan baik sejumlah 16,87%, cukup baik sejumlah 41,25%, dan kurang baik sejumlah 41,87%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa efektivitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori kurang baik.

2. Efisiensi

Tabel 6 : Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air dilihat dari Indikator Efisiensi

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas	3	-	-	3
2	Upaya dinas dalam mengatasi abrasi sudah dilakukan dengan baik	3	-	-	3
3	Pemantauan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan pembangunan	3	-	-	3
4	Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi telah sepenuhnya dilaksanakan	3	-	-	3
Jumlah		12	-	-	12
Persentase		100%	-	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator efisiensi.

Pada pertanyaan Bagaimana ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas, responden memberikan tanggapan baik

sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Pertanyaan Apakah upaya dinas dalam mengatasi abrasi sudah dilakukan dengan baik, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Selama ini upaya yang dilakukan dinas ialah melakukan survey, perencanaan dan melaksanakan kegiatan seperti membangun turap penahan abrasi.

Pertanyaan Apakah ada pemantauan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan pembangunan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Pertanyaan Apakah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi telah sepenuhnya dilaksanakan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Tabel 7: Tanggapan Responden masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang dilihat dari Indikator Efisiensi

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas	5	19	16	40
2	Upaya dinas dalam mengatasi abrasi sudah dilakukan dengan baik	4	14	22	40
3	Pemantauan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan pembangunan	4	21	15	40
4	Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataaRuang dalam mengatasi abrasi telah sepenuhnya dilaksanakan	1	14	25	40
Jumlah		14	68	78	160
Persentase		8,75%	42,5%	48,75%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator efisiensi. Pada pertanyaan Bagaimana ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, tanggapan cukup baik 19 orang, dan 16 orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang cukup tepat waktu dalam melaksanakan tugas.

Pertanyaan Apakah upaya dinas dalam mengatasi abrasi sudah dilakukan dengan baik, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, tanggapan cukup baik 14 orang, dan 22 orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

Pertanyaan Apakah ada pemantauan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dalam menjalankan pembangunan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, tanggapan cukup baik 21 orang, dan 15 orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

Pertanyaan Apakah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi telah sepenuhnya dilaksanakan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, tanggapan cukup baik 14 orang, dan 25 orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

3. Kecukupan

Tabel 8 : Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air dilihat dari Indikator Kecukupan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Pembangunan turap dikawasan yang terkena abrasi	3	-	-	3
2	Kepedulian masyarakat dalam memelihara kawasan sungai	-	3	-	3
3	Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas lain dalam mengatasi abrasi	3	-	-	3
4	Pengendalian yang dilakukan dinas dalam mengatasi abrasi	2	1	-	3
Jumlah		8	4	-	12
Persentase		66,6%	33,3%	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator kecukupan. Pada pertanyaan Bagaimana Pembangunan turap dikawasan yang terkena abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan turap dikawasan yang terkena abrasi dilakukan dengan baik.

Pertanyaan Bagaimana Kepedulian masyarakat dalam memelihara kawasan sungai, responden

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada indikator efisiensi. Tanggapan baik sejumlah 8,75%, cukup baik sejumlah 42,5%, dan kurang baik sejumlah 48,75%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa efisiensi dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori kurang baik.

memberikan tanggapan baik sebanyak 0, tanggapan cukup baik 3 orang, dan tanggapan kurang baik 0. Kepedulian masyarakat dalam memelihara kawasan sungai selama ini dinilai cukup baik.

Pertanyaan Bagaimana koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas lain dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0. Dinas yang berkoordinasi yaitu ada BAPPEDA, Dinas Pertanian, BAPEMAN.

Pertanyaan Bagaimana pengendalian yang dilakukan dinas dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 1 orang,

dan tanggapan kurang baik 0. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan monitoring dimana tempat-tempat yang terdapat abrasi.

Tabel 9 : Tanggapan Responden masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang dilihat dari Indikator Kecukupan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Pembangunan turap dikawasan yang terkena abrasi	2	10	28	40
2	Kepedulian masyarakat dalam memelihara kawasan sungai	3	23	14	40
3	Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas lain dalam mengatasi abrasi	2	10	28	40
4	Pengendalian yang dilakukan dinas dalam mengatasi abrasi	2	8	30	40
Jumlah		9	51	100	160
Persentase		5,62%	31,87%	62,5%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator kecukupan. Pada pertanyaan Bagaimana Pembangunan turap dikawasan yang terkena abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 10 orang, dan 28 orang responden memberikan tanggapan kurang baik.

Pertanyaan Bagaimana Kepedulian masyarakat dalam memelihara kawasan sungai, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 23, dan 14 orang responden memberikan tanggapan kurang baik. Kepedulian masyarakat dalam memelihara kawasan sungai selama ini dinilai cukup baik.

Pertanyaan Bagaimana koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas lain dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2

orang, tanggapan cukup baik 10, dan 28 orang responden memberikan tanggapan kurang baik. Masyarakat menilai koordinasi dengan dinas lain kurang baik karena apabila ada koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup ataupun Dinas Perkebunan dan Kehutanan atau Dinas Perikanan dan Kelautan pasti ada penanaman hutan bakau di pinggir sungai rokan namun hal tersebut sampai saat ini tidak ada.

Pertanyaan Bagaimana pengendalian yang dilakukan dinas dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 8 orang, dan 30 orang responden memberikan tanggapan kurang baik. Tidak ada pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada indikator

efisiensi. Tanggapan baik sejumlah 5,62%, cukup baik sejumlah 31,87%, dan kurang baik sejumlah 62,5%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa kecukupan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori kurang baik.

4. Perataan

Tabel 10 : Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air dilihat dari Indikator Perataan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Masyarakat mendapat Keadilan dalam pembangunan untuk mengatasi abrasi	2	1	-	3
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah memberikan keadilan dalam menetapkan kebijakan	2	1	-	3
3	Pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi sudah merata	-	3	-	3
4	Pemeliharaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terlaksana dengan baik	-	1	2	3
Jumlah		4	6	2	12
Persentase		33,3%	50%	16,6%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator perataan. Pada pertanyaan Apakah masyarakat mendapat Keadilan dalam pembangunan untuk mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 1 orang, dan tanggapan kurang baik 0.

Pertanyaan Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah memberikan keadilan dalam menetapkan kebijakan, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 1 orang, dan tanggapan kurang baik 0. Dalam menetapkan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah memberikan keadilan.

Pertanyaan Apakah pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi sudah merata, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0, tanggapan cukup baik 3 orang, dan tanggapan kurang baik 0. Pembangunan tidak sepenuhnya merata melihat dari banyaknya kawasan yang terkena abrasi, selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat.

Pertanyaan Apakah pemeliharaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terlaksana dengan baik, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0, tanggapan cukup baik 1 orang, dan 2 orang responden memberikan tanggapan kurang baik. Tidak ada

pemeliharaan sama sekali oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 11 : Tanggapan Responden masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang dilihat dari Indikator perataan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Masyarakat mendapat Keadilan dalam pembangunan untuk mengatasi abrasi	2	25	3	40
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah memberikan keadilan dalam menetapkan kebijakan	3	20	17	40
3	Pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi sudah merata	2	6	32	40
4	Pemeliharaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terlaksana dengan baik	-	6	34	40
Jumlah		7	57	96	160
Persentase		4,37%	35,62%	60%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada indikator perataan. Tanggapan baik sejumlah 4,37%, cukup baik sejumlah 35,62%, dan kurang baik sejumlah 60%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa perataan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori kurang baik.

5. Responsivitas

Tabel 12 : Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air dilihat dari Indikator Responsivitas

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi	2	1	-	3
2	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja dinas dalam mengatasi abrasi	2	1	-	3
3	Menyusun program untuk melaksanakan pembangunan dalam mengatasi abrasi	3	-	-	3
4	Pengelolaan yang dilakukan dinas sudah sesuai dengan prosedur	3	-	-	3
Jumlah		10	2	-	12
Persentase		83,3%	16,6%	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator responsivitas. Pada pertanyaan Bagaimana hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 1 orang, dan tanggapan kurang baik 0. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi baik.

Pertanyaan Bagaimana Kepuasan masyarakat terhadap kinerja dinas dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup

baik 1 orang, dan tanggapan kurang baik 0.

Pertanyaan Bagaimana menyusun program untuk melaksanakan pembangunan dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Pertanyaan Apakah pengelolaan yang dilakukan dinas sudah sesuai dengan prosedur, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0. Pengelolaan yang dilakukan ialah dengan melaksanakan pembangunan tepat waktu.

Tabel 13 : Tanggapan Responden masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang dilihat dari Indikator Responsivitas

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi	3	15	22	40
2	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja dinas dalam mengatasi abrasi	2	10	28	40
3	Menyusun program untuk melaksanakan pembangunan dalam mengatasi abrasi	5	20	15	40
4	Pengelolaan yang dilakukan dinas sudah sesuai dengan prosedur	4	13	23	40
Jumlah		14	58	88	160
Persentase		8,75%	36,25%	55%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada indikator responsivitas. Tanggapan baik sejumlah 8,75%, cukup baik sejumlah 36,25%, dan kurang baik sejumlah 55%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa responsivitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori kurang baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Irwandi jabatan (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) diketahui bahwa “Dalam menyusun program, hasil musrembang Kabupaten ataupun usulan-usulan lain ditampung mana program kabupaten, provinsi maupun pusat didiskusikan lagi sesuai dengan tugas dan fungsi dinas-dinas terkait”

Dari paparan data dan hasil wawancara diatas, serta observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba

Melintang) pada indikator responsivitas berada pada kategori kurang baik.

6. Ketepatan

Tabel 14 : Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air dilihat dari Indikator Ketepatan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Pembangunan yang dilakukan memberikan kepuasan terhadap kinerja dinas dalam mengatasi abrasi	3	-	-	3
2	Ketertiban dan keteraturan pembangunan yang dilakukan dinas	3	-	-	3
3	Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dinas sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ditetapkan dalam peraturan daerah	2	1	-	3
4	Pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	2	-	3
Jumlah		9	3	-	12
Persentase		75%	25%	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator ketepatan. Pada pertanyaan Apakah pembangunan yang dilakukan memberikan kepuasan terhadap kinerja dinas dalam mengatasi abrasi, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Pertanyaan Bagaimana Ketertiban dan keteraturan pembangunan yang dilakukan dinas, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, tanggapan cukup baik 0, dan tanggapan kurang baik 0.

Pertanyaan Apakah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dinas

sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ditetapkan dalam peraturan daerah, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, tanggapan cukup baik 1 orang, dan tanggapan kurang baik 0. Jumlah tenaga kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 87 orang.

Pertanyaan Apakah pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, tanggapan cukup baik 2 orang, dan tanggapan kurang baik 0.

Tabel 15 : Tanggapan Responden masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang dilihat dari Indikator Ketepatan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Pembangunan yang dilakukan memberikan kepuasan terhadap kinerja dinas dalam mengatasi abrasi	1	21	18	40
2	Ketertiban dan keteraturan pembangunan yang dilakukan dinas	3	27	10	40
3	Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dinas sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ditetapkan dalam peraturan daerah	3	28	9	40
4	Pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	8	31	40
Jumlah		8	84	68	160
Persentase		5%	52,5%	42,5%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada indikator ketepatan. Tanggapan baik sejumlah 5%, cukup baik sejumlah 52,5%, dan kurang baik sejumlah 42,5%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa ketepatan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori cukup baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Irwandi jabatan (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) diketahui bahwa “Sudah pernah melakukan pembangunan yakni pada tahun 2007, setelah keluarnya Peraturan Menteri PUPR No. 4 tahun 2015 wilyah sungai rokan menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Riau makanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi melakukan pembangunan untuk mengatasi abrasi di kawasan sungai rokan karena bukan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir lagi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir hanya memantau dan mengusulkan ke Pemerintah Provinsi ”

Dari paparan data dan hasil wawancara diatas, serta observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) pada indikator ketepatan berada pada kategori cukup baik.

Tabel 16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Sekretaris, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

No	Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Efektivitas	100%	-	-	100%
2	Efisiensi	100%	-	-	100%
3	Kecukupan	66,6%	33,3%	-	100%
4	Perataan	33,3%	50%	16,6%	100%
5	Responsivitas	83,3%	16,6%	-	100%
6	Ketepatan	75%	25%	-	100%
Jumlah		458,2%	124,9%	16,6%	600%
Persentase		76,36%	20,81%	2,76%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada semua indikator. Tanggapan baik sejumlah 76,36%, cukup baik sejumlah 20,81%, dan kurang baik sejumlah 2,76%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa

hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori baik.

Tabel 17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat yang Terkena Dampak Abrasi di Kelurahan Rimba Melintang

No	Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Efektivitas	16,87%	41,25%	41,87%	100%
2	Efisiensi	8,75%	42,5%	48,75%	100%
3	Kecukupan	5,62%	31,87%	62,5%	100%
4	Perataan	4,37%	35,62%	60%	100%
5	Responsivitas	8,75%	36,25%	55%	100%
6	Ketepatan	5%	52,5%	42,5%	100%
Jumlah		49,36%	239,99%	310,62%	600%
Persentase		8,22%	39,99%	51,77%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti, 2018

Berlandaskan data pada tabel diatas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden pada semua indikator. Tanggapan baik sejumlah 8,22%, cukup baik sejumlah 39,99%, dan kurang baik sejumlah 51,77%. Dari hasil data tersebut, diketahui bahwa hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi Abrasi di kawasan sungai rokan (studi kasus di Kelurahan Rimba Melintang) berada pada kategori kurang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut kesimpulan pada Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) :

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sekali membangun turap di kelurahan rimba melintang yakni pada tahun 2007, setelah itu belum pernah ada program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan turap ataupun bangunan penahan gelombang lainnya di kelurahan rimba melintang. Turap yang dibangun tersebut pun sekarang sudah rusak/tidak berfungsi lagi dikarenakan tidak adanya pemeliharaan ataupun pengelolaan lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan kata lain setelah dibangun dibiarkan begitu saja tanpa ada pemeliharaan ataupun pengelolaan lebih lanjut. Sementara abrasi semakin hari semakin parah.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, maka dapat disimpulkan dari keseluruhan indikator pada pada Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) pada kategori kurang baik. Hal ini berarti bahwa dalam Evaluasi Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) masih belum optimal dari berbagai aspek yang telah disajikan dalam item penilaian yang terdapat pada masing-masing indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir segera melakukan pembangunan ataupun mengusulkan ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam mengatasi abrasi, hal ini mengingat bahwa luasnya kawasan abrasi yang sudah semakin parah di kawasan sungai rokan Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kelurahan Rimba Melintang. Kemudian nanti apabila ada program pembangunan turap ataupun bangunan penahan gelombang lainnya dalam mengatasi abrasi di harapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melakukan pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut agar bangunan tersebut dapat terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini mengingat bahwa pada pembangunan turap di tahun 2007 di Kelurahan Rimba Melintang yang hanya bertahan selama 4 tahun yang sekarang

sudah rusak/tidak berfungsi lagi dikarenakan tidak adanya pemeliharaan ataupun pengelolaan lebih lanjut setelah dibangun.

2. Berdasarkan penelitian dan penilaian yang telah dilakukan penulis dengan beberapa indikator yaitu indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, masih terdapat beberapa indikator yang kurang baik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan perataan, untuk indikator indikator efektivitas penulis menyarankan sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan harus mampu menyesuaikan waktu yang telah direncanakan dengan target dan kebutuhan. Untuk indikator efisiensi penulis menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas harus mampu mempertimbangkan antara waktu dan biaya yang telah direncanakan agar biaya/anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan serta lebih meningkatkan upaya dalam mengatasi abrasi. Untuk indikator kecukupan penulis menyarankan bahwa seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam pengendalian dan pembangunan turap lebih baik lagi serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk indikator perataan penulis menyarankan bahwa seharusnya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam mendistribusikan pembangunan lebih proporsional dan merata serta melakukan pemeliharaan jangan setelah dibangun dibiarkan begitu saja. Untuk indikator responsivitas penulis menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir seharusnya dalam penyediaan pembangunan harus lebih mampu dalam menyusun program serta pengelolaan dikawasan abrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solochin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, N William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Halim Abdul dan Syam Kusufi Muhammad. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto dkk. 2009. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta; Universitas Terbuka.
- Namawi, Ismali. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

- Ndraha, Taliziduhu 2010. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Nurcholis, Muhammad. 2004. *Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Saiman Leonardus. 2012. *Kewirausahaan: Teori, Praktik dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, P. Sondang. 1985. *Organisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soeroso R. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: CV. Media Brilian.
- Syafiie Inu Kencana. 1998. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama
- Yussa A. Tarmizi dan Andry Henry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru- Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli & Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi – fungsi manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli., Awang, Azam., dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR

Dokumentasi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
- Buku Pedoman Penulisan *Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Edisi Revisi 2013. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.